

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 90/PUU/XXI-2023 TERKAIT ATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Program Sarjana

Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DIDIK SUFAJAR

NPM : 2074201001457

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 90/PUU/XXI-2023 TERKAIT BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

DIDIK SUFAJAR

NPM : 2074201001457

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2024

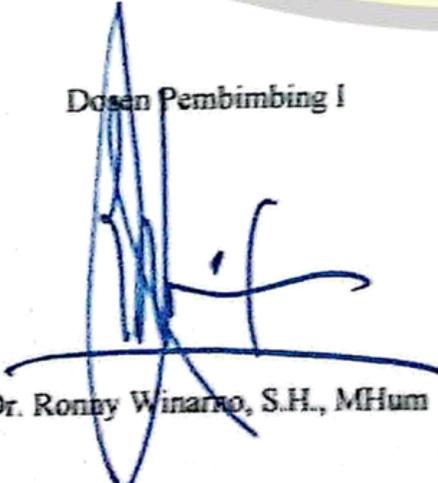
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 25 Juli 2024



Dosen Pembimbing I



Dr. Ronny Winarno, S.H., MHum

Dosen Pembimbing II



Wiwin Ariesta, S.H., M.H

**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 90/PUU/XXI-2023 TENTANG BATAS USIA
CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

DIDIK SUFAJAR

NPM : 2074201001457

Tanggal : 05 Agustus 2024

Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, S.H M.H.

Anggota Dewan Penguji

Wiwin Ariesta, S.H. M.H.

Sekretaris Penguji

Dr. Ronny Winarno, S.H M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 05 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, SH M.Hum.

ABSTRAK

Dalam konteks kota, migrasi dari pedesaan ke perkotaan sering kali dipandang sebagai jalan menuju peluang ekonomi, mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih individualistik dan kurang personal. Hal ini mencerminkan orientasi ekonomi yang lebih fokus pada keuntungan pribadi. Sementara itu, sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), terus berkembang sebagai bagian penting dalam struktur ekonomi, meskipun sering kali menghadapi tantangan perlindungan ekonomi yang kurang dari pemerintah. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu mengenai, (1) Bagaimana kewajiban pemerintahan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Pasuruan berdasarkan Pasal 34 dan 35 Perda Kota Pasuruan No.2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?, (2) Apakah tujuan hukum yang hendak dicapai dengan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Pasuruan dalam mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang mengkaji peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini adalah studi pustaka (*bibliography study*), yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Dalam hasil penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan yang jelas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pemberdayaan PKL, sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan PKL di Kota Pasuruan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan teratur serta meningkatkan kesejahteraan PKL melalui pendekatan yang berkelanjutan. Pemberdayaan PKL didasarkan pada Perda Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang mengatur lokasi usaha, perizinan, dan perlindungan hukum bagi PKL, sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Implementasi pemberdayaan PKL mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan implementasi yang efektif, pemerintah Kota Pasuruan dapat mencapai keseimbangan antara mendukung pengembangan usaha PKL dan menjaga ketertiban umum, yang berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kewajiban, Pemberdayaan, AUPB, dan Pedagang Kaki Lima

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 25 Juli 2024

Penulis

METERAI
TEMPER
74ALX313126094

DIDIK SUFAJAR

NPM : 2074201001457

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Tuhan Penguasa Semesta, yang menciptakan kecerdasan dan ilmu pada setiap manusia. Atas rahmat-Nya pula proposal penelitian ini dengan judul “ ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN” ini bisa selesai tepat pada waktunya.

Penentuan judul dimaksud, karena peneliti melihat adanya persoalan yang serius dalam sistem hukum di negara kita, dalam hal ini demokrasi yang seakan semakin terkikis dan kepentingan kekuasaan semakin terlihat. Dari sinilah masyarakat mulai melihat adanya sebuah ketidakadilan bagi golongan masyarakat yang lemah sehingga mendorong dari golongan masyarakat untuk melakukan uji materi terhadap peraturan yang mengatur mengenai pemilu.

Ada harapan yang besar dalam diri peneliti pada penelitian ini, yang mana sebagai seorang akademisi sekiranya penulisan ini dapat memberikan sumbangsih kepada negara khususnya dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam mengoreksi dan memberikan saran serta masukan dalam rangka perbaikan sistem hukum negara kita.

Skripsi penelitian hukum ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab peneliti dalam menjalankan tugas pembuatan skripsi, yang merupakan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Dalam penulisan skripsi penelitian hukum ini penulis banyak memperoleh bantuan baik secara moril maupun materiil, dukungan dari Dosen Pembimbing, keluarga ataupun keluarga besar yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi kepada peneliti.

Peneliti sadar akan banyaknya kekurangan dalam diri peneliti, terutama dalam hal pemahaman mengenai berbagai bentuk kaidah dan norma-norma hukum, kiranya sangatlah tidak pantas apabila peneliti tidak menyampaikan rasa terimakasih dan salam hormat kepada

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Bapak Yudhia Ismail, SH., MHum;
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH., MHum., selaku Dosen Pembimbing I;
4. Ibu Wiwin Ariesta, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II;
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH., selaku Dosen Penguji;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
7. Istriku tercinta Arum Soeprapti, yang senantiasa memberikan semangat dan motifasi selama penelitian menempuh kuliah ini;
8. Teman-temanku tercinta, khususnya yang sudah bersama-sama selama lebih kurang 4 (empat) tahun melalui hari-hari dibangku kuliah ini, dan secara umum kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
9. Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penelitian ini;

Semoga Allah S.W.T senantiasa akan membalas segala kebaikan dan ketelusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dengan limpahan Rahmad, Maghfirah dan Hidayah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Pasuruan, 27 Juli 2024

Peneliti



Didik Sufajar
NPM : 2074201001457



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Pemilihan Umum	15
1. Pengertian Pemilihan Umum, Hukum Pemilihan Umum, dan Teori Hukum Pemilihan Umum	15
2. Asas Demokrasi, Asas Pemilihan Umum serta Hak dan Kewajiban dalam Pemilihan Umum dan Pengaturan Hukumnya	24
3. Subtansi dan Urgensi Pasal 169 huruf q Undang- Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	35
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU- XXI/2023	37

1. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	37
2. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 . .	42
3. Dinamika Hukum dan Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023	46
C. Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	51
1. Pengertian Mengenai Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	51
2. Ruang Lingkup Tugas, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	52
3. Korelasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU/XXI/2023 dengan Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	59
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Masalah	61
B. Ruang Lingkup Penelitian	62
C. Jenis dan Sumber Data	62
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	65
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	66

BAB IV	ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN	
	A. Asas-Asas Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Terkait Persyaratan Batas Usia Pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	67
	B. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Tidak Bertentangan Dengan Asas Demokrasi	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	